

Judul : Kerap mengalami kenaikan signifikan, pemerintah usulkan penyaluran program minyakita melalui BUMN
Tanggal : Senin, 20 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Kerap Mengalami Kenaikan Signifikan

Pemerintah Usulkan Penyaluran Program Minyakita Melalui BUMN

MINYAK goreng rakyat atau Minyakita merupakan program subsidi Pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa harganya kerap mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selain itu, terkadang juga terjadi kelangkaan stok.

Terbaru, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan sidak ke beberapa pasar tradisional. Hasilnya, harga Minyakita ditemukan tidak

sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Untuk mengendalikan kondisi tersebut, Amran mengusulkan agar penyaluran Minyakita melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 60 hingga 100 persen. Sementara itu, saat ini penugasan penyaluran Minyakita melalui BUMN masih sebesar 35 persen, berdasarkan kebijakan dari Kementerian Perdagangan.

"Ke depan, kami sudah koordinasi dengan Pak Mendag. Ini kan 30 per-

sen. Kalau bisa ke depan kita naikan lagi, apakah 60 persen ke BUMN atau 100 persen. Aku lihat situasinya nanti, biar mudah dikontrol. Kalau ada kenaikan harga, ya sudah BUMN yang bertanggung jawab," kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (18/4/2026).

Amran meminta pedagang tidak menaikkan harga jual Minyakita. Hal ini sebagai respons terhadap potensi kenaikan harga minyak seiring dengan meningkatnya harga plastik.

"Jangan dinaikkanlah (harga

Minyakita). Kan ada kenaikan harga plastik. Saudaraku, sahabatku, Bapak/Ibu (produsen plastik) kan sudah lama berbisnis. Pertanyaanku, untung tidak selama ini berbisnis? Kalau masih bertahan sampai sekarang, berarti untung, kan?" jelasnya.

Usulan Menteri Amran menuai perdebatan di media sosial. Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, sangat mendukung jika penyaluran Minyakita melalui BUMN. Baginya, banyak manfaat jika 100 persen penyaluran Minyakita dilakukan lewat

BUMN. "Biar negara lebih mudah mengontrol," ujar Herman.

Pandangan berbeda diungkapkan Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto. Menurutnya, penyaluran Minyakita lebih baik melalui koperasi desa. "Lebih efektif dan teruji," sarannya.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Suroto dan Herman Khaeron mengenai usulan agar Minyakita disalurkan oleh BUMN, berikut petikan wawancaranya.

Herman Khaeron
Anggota Komisi VI DPR

Biar Negara Lebih Mudah Mengontrol



“Negara dapat lebih mudah mengontrol distribusi dan harga. Jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga di suatu wilayah, Pemerintah dapat segera melakukan intervensi dan stabilisasi.”

APA pendapat Anda tentang usulan Menteri Amran agar penyaluran Minyakita melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

Saya setuju. Minyakita merupakan minyak penugasan Pemerintah yang bertujuan mengintervensi harga agar terjangkau bagi masyarakat. Karena sifatnya subsidi, penyalurannya sebaiknya melalui BUMN agar lebih terkontrol.

Mengapa Anda mendukung penyaluran melalui BUMN?

Karena ini adalah program subsidi dengan harga yang ditetapkan Pemerintah. Jika disalurkan oleh BUMN, pengawasannya lebih mudah, potensi penyimpangan bisa ditekan, dan manfaatnya juga kembali ke negara.

Bagaimana dengan usulan penyaluran hingga 100 persen melalui BUMN?

Itu tergantung kebijakan Pemerintah. Tidak harus diatur dalam undang-undang. Pemerintah dapat menentukan apakah 100 persen atau sebagian, sesuai kebutuhan.

Apakah kebijakan ini terkait temuan harga Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET)?

Betul. Di lapangan ditemukan harga yang melebihi HET, bahkan ada kemungkinan tawaran yang tidak sesuai. Hal ini menjadi dasar perlunya penguatan pengawasan distribusi.

Apa kelebihan penyaluran Minyakita melalui BUMN?

Negara dapat lebih mudah mengontrol distribusi dan harga. Jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga di suatu wilayah, Pemerintah dapat segera melakukan intervensi dan stabilisasi.

Apakah masyarakat akan merasakan manfaat langsung?

Ya, masyarakat akan mendapatkan harga sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah sehingga lebih terjangkau.

Bagaimana peran DPR dalam kebijakan ini?

DPR menyetujui pada level kebijakan umum, terutama saat kondisi minyak goreng langka dan mahal. Namun, pelaksanaan teknis seperti distribusi menjadi domain Pemerintah. ■ **REN**

SUROTO
Ketua AKSES

Koperasi Desa Bisa Menjadi Alternatif



“Koperasi tidak berorientasi pada profit semata, tetapi pada manfaat bagi anggota dan masyarakat. Selain itu, koperasi memiliki jangkauan yang kuat.”

BAGAIMANA pendapat Anda mengenai usulan Menteri Pertanian agar Minyakita disalurkan 100 persen melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

Dalam perspektif teori ekonomi, barang bersubsidi merupakan bagian dari barang publik, karena mengancam da-

na negara yang berasal dari pajak rakyat. Tujuannya adalah meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.

Karena itu, distribusinya tidak tepat jika diserahkan kepada mekanisme pasar bebas atau perusahaan swasta yang berorientasi pada keuntungan. Intervensi harga juga berpotensi menimbulkan *moral hazard*, spekulasi, dan kesulitan pengawasan.

Apakah persoalan ini sudah terlintas dalam praktik saat ini?

Ya, hal ini tercermin dalam distribusi berbagai komoditas bersubsidi

seperti beras SPHP, pupuk dan benih subsidi. Minyakita, gas 3 kg, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Masalah yang sering muncul antara lain ketidakpatuhan sasaran, harga tidak sesuai ketentuan, kelangkaan, hingga peredaran barang palsu.

Lalu, apakah BUMN menjadi solusi yang tepat?

Secara konseptual, BUMN dapat berperan. Namun, tetap diperlukan penguatan lebih lanjut.

Apa alternatif yang Anda tawarkan untuk penyaluran Minyakita?

Koperasi desa atau kelurahan menjadi alternatif yang lebih tepat. Koperasi tidak berorientasi pada profit semata, tetapi pada manfaat bagi anggota dan masyarakat. Selain itu, koperasi memiliki jangkauan yang kuat hingga ke tingkat akar rumput.

Apakah maksudnya penyaluran melalui koperasi?

Ya. Model yang dapat dikembangkan adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dengan model ini, distribusi menjadi lebih jelas, terlokalisasi, dan mudah diawasi. Pengawasan juga lebih kuat karena berbasis kepemilikan kolektif masyarakat.

Seberapa besar peluang keberhasilannya jika melalui koperasi?

Secara historis, Indonesia pernah berhasil menggunakan model serupa, seperti distribusi pupuk bersubsidi melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Saat terjadi masalah, tanggung jawabnya jelas dan dapat segera ditangani. Karena itu, sudah saatnya Pemerintah meratifikasi ulang sistem distribusi subsidi dengan menjadikan koperasi sebagai jalur utama agar lebih tepat sasaran, harga sesuai, dan pasokan terjaga. ■ **REN**